

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan jangka panjang yang sulit diatasi. Kasus kemiskinan terparah di Indonesia yang terjadi dalam waktu dekat ini yaitu pada saat munculnya Covid-19, yang dimana berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin meningkat baik yang diperkotaan maupun diperdesaan dalam kurung waktu satu tahun dimulai dari tahun 2020 sampai tahun 2021 sebanyak 270.203,9 ribu jiwa menjadi 272.682.5 ribu jiwa.¹

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi di sebagian besar negara berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidak mampuan sebagian orang untuk mengatur kehidupan mereka pada tingkat yang dianggap manusiawi. Keadaan ini menyebabkan kualitas sumber daya manusia menurun sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan pendapatan.²

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh keturunan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan hidup bangsa, dan peran serta dalam kegiatan kemasyarakatan, implementasi dunia,tatanan berdasarkan kemerdekaan,

¹<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun>. diunduh 2024.

² T. Iskandar Ben Hasan dan Zikriah, *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penduduk Miskin di Aceh*, , Jurnal SAINS, Vol. 1, No. 1, (2019), h. 1.

Perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.³ Untuk mencapai tujuan tersebut, negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya meskipun dalam kondisi miskin, sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Selain berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mensejahterakan masyarakat, pemerintah Indonesia juga harus bersikap jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab sehingga memudahkan mengorganisir masyarakat agar mau berkerja sama, saling bahu-membahu menyukseskan pembangunan negara. Karena kerja sama atas landasan *amar ma'ruf wa nahi munkar* maka akan mendapat dukungan dari Allah SWT karena mengikuti sesuai syariatnya.⁴ Hal ini seperti disebutkan Allah SWT dalam potongan Q:S Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan hendaklah kamu tolong-menolong untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam melakukan dosa (maksiat) dan kejahatan. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Berat azab siksanYa (bagi siapa yang melanggar perintahNya)" (Q.S. al-Maidah: 2).⁵

Dari penjelasan ayat di atas dengan demikian, dalam membangun negara, pemerintah Indonesia harus melihat rakyat sebagai aset pembangunan yang sangat potensial dan bukan sebagai beban negara. Untuk merealisasikan ini, menurut Muhammad Akram Khan dalam penelitian M. Shabri mengatakan bahwa rakyat

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan, Pasal 1.

⁴ M. Shabri Abd. Majid, Mengentaskan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 1, (2011), h. 201.

⁵ <https://quran.nu.or.id/al-maidah> 2

hendaklah dilibatkan secara lebih aktif serta diberikan kebebasan dalam membuat keputusan, terutama, menyangkut dengan keinginan positif mereka untuk memberdayakan ekonominya. Semua ini, pada gilirannya, akan membantu pemerintah untuk mengangkat harkat dan martabat ekonomi rakyat secara gradual, tapi pasti dan menyeluruh. Penglibatan masyarakat Indonesia secara aktif dan kolektif dalam setiap pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah adalah merupakan insentif yang sangat berharga bagi mereka sehingga akan memotivasi mereka untuk merubah nasib dan membangun ekonomi dirinya sendiri, keluarganya, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan nasib pembangunan ekonomi negara pada umumnya.⁶

Selain penglibatan masyarakat dalam menurunkan angka kemiskinan negara Indonesia sebagai negara yang memiliki mayoritas umat islam harusnya menerapkan sistem pemerintahan sesuai syariat islam. Misalnya dalam menerapkan Institusi Diwan. Institusi Diwan ini bertugas untuk melakukan sensus penduduk secara reguler pada setiap periode. Berdasarkan hasil sensus ini, Umar bin Khattab menetapkan jumlah gaji pensiunan minimum yang akan diberikan kepada para janda, anak-anak yatim, orang-orang yang telah berjuang di medan perang membela Islam sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, dan semua orang cacat, sakit, serta orang jompo. Jumlah minimum gaji pensiunan yang ditetapkan adalah sebanyak 250 dirham setiap tahun. Bahkan contoh keseriusan Umar bin Khattab dalam memberantas kemiskinan dapat dirujuk dengan tindakan nyata langsungnya yang melakukan kajian ilmiah terhadap 30 orang dengan tujuan untuk mengetahui berapa kebutuhan minimal rata-rata per-hari sebenarnya yang diperlukan seseorang

⁶ M. Sharib. *Op.cit*, h. 201.

penduduk agar dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka.⁷ Maka ketika sistem Instansi Diwan ini diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia maka akan dapat membantu menurunkan angka kemiskinan dan memberi bantuan tepat sasaran.

Sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah dalam konsekuensi yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia. Karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga suatu kewajiban bila pola pembangunan ekonomi di Indonesia tidak seragam. Ketidakseragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya tingginya tingkat kemiskinan di beberapa wilayah.⁸

Salah satu daerah di Indonesia yang tingkat kemiskinannya masih relatif tinggi pada tahun 2019-2023, dikarenakan wabah Covid-19 yaitu Sumatera Utara. Daerah ini merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia tepatnya terletak dipulau Sumatera, yang memiliki berbagai karakteristik wilayah dengan kekayaan alam yang berlimpah. Sumber pertumbuhan Ekonomi utama Sumatera Utara adalah perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri pengolahan. Namun potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara masih relatif tinggi selama periode 2019-2023.

Berikut ini tabel yang menunjukkan persentase kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2023:

⁷ M. Sharib. *Op.cit*, h. 203.

⁸ Anggara, P. G. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara" (Doctoral dissertation, UNIMED, 2019). h. 1.

Tabel 1.1
Tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara tahun
2019-2023 (Dalam Bentuk Persen%)

no	Kabupaten dan Kota			Tahun		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sumatera utara	8.83	8.75	9.01	8.42	8.15
2	Nias	15.94	16.6	16.82	16	15.1
3	Mandailing Natal	9.11	9.18	9.49	8.92	8.86
4	Tapanuli Selatan	8.6	8.47	8.8	8.07	7.01
5	Tapanuli Tengah	12.53	12.38	12.67	11.71	11.5
6	Tapanuli Utara	9.46	9.37	9.72	8.93	8.54
7	Toba	8.6	8.71	8.99	8.89	8.04
8	Labuhan batu	8.44	8.44	8.74	8.26	7.99
9	Asahan	9.68	9.04	9.35	8.64	8.21
10	Simalungan	8.81	8.46	8.81	8.26	7.84
11	Dairi	7.7	8.04	8.31	7.88	7.47
12	Karo	8.23	8.7	8.79	8.17	7.47
13	Deli Serdang	3.89	3.88	4.01	3.62	3.44
14	Langkat	9.91	9.73	10.12	9.49	9.23
15	Nias Selatan	16.42	16.74	16.92	16.48	16.39
16	Humbang Hasundutan	8.75	9.36	9.65	8.86	8.69
17	Pakpak Bharat	9.27	9.28	9.35	8.66	7.54
18	Samosir	12.52	12.48	12.68	11.17	11.66
19	Serdang bedagai	7.9	7.97	8.3	7.82	7.44
20	Batu Bara	12.14	11.88	12.38	11.53	11.38
21	Padang Lawas Utara	9.6	9.7	9.92	8.94	8.79
22	Padang Lawas	8.28	8.37	8.69	8.05	7.89
23	Labuhan Batu Selatan	8.94	8.34	8.53	8.09	8.06
24	Labuhan Batu Utara	9.57	9.53	10.02	9.09	9.08

25	Nias Utara	24.99	25.07	25.66	23.4	21.79
26	Nias Barat	25.51	25.69	26.42	24.75	22.81
27	Sibolga	12.36	11.95	12.33	11.47	11.41
28	Tanjung Balai	14.04	13.33	13.4	12.45	12.21
29	Pematang Siantar	8.63	8.27	8.52	7.88	7.24
30	Tebing Tinggi	9.94	9.85	10.3	9.59	9.49
31	Medan	8.08	8.01	8.34	8.07	8
32	Binjai	5.66	5.71	5.81	5.1	4.79
33	Padang Sidempuan	7.26	7.4	7.53	6.89	6.85
34	Gunung Sitoli	16.23	16.41	16.45	14.81	14.78

Sumber: bps Sumatera Utara

Berdasarkan tabel 1.1 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara jumlah dan presentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019-2023 mengalami kenaikan dan penurunan yang lumayan signifikan dilihat dari data tahun 2019 persentase penduduk miskin sebanyak 8.83 kemudian naik menjadi 8.75 di tahun 2020 dan mengalami peningkatan yang drastis di saat tahun 2021 sebanyak 9.01 % dimana di tahun tersebut negara kita dilanda pandemi dan provinsi Sumatera Utara juga terdampak, yang dimana mayoritas penduduk.

Sumatera Utara bekerja sebagai Buruh dan Petani. Karena adanya kebijakan PPKM mengakibatkan banyak masyarakat Sumatera Utara yang kehilangan pekerjaan dan mengakibatkan angka kemiskinan melonjak naik, kemudian di tahun 2022 mulai menurun menjadi 8.42% dikarenakan mulai menormalnya perekonomian masyarakat kemudian di tahun 2023 sangat turun drastis di banding empat tahun kebelakang menjadi 8.15%. Kemudian di kabupaten dan kota mengalami fluktuatif dan berbeda-beda. Di tahun 2019-2023 kabupaten Nias Barat

memiliki persentase kemiskinan paling tinggi diantara Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara yaitu di atas 25%. Sedangkan kabupaten Deli Serdang memiliki persentase kemiskinan terendah yaitu di bawah 4%.

Secara keseluruhan, persentase kemiskinan di Sumatera Utara mengalami penurunan yang konsisten dari tahun 2019-2023. Upaya pemerintah dan berbagai program sosial berkontribusi pada pengurangan jumlah penduduk miskin, mencerminkan perbaikan dalam kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁹

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting selain kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Menurut Schumpeter dalam buku putong menyebutkan bahwa: "pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi (pendapatan nasional) akibat pertumbuhan penduduk dan peningkatan tingkat tabungan secara alami".¹⁰ Sementara itu, menurut pendapat beberapa ahli ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi merupakan istilah yang digunakan oleh negara-negara maju untuk menunjukkan keberhasilan dalam proses pembangunannya, suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila tingkat kegiatan perekonomian pada saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian pada periode sebelumnya.

Berikut ini tabel yang menunjukkan persentase pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Utara periode tahun 2019-2023:

⁹ Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumatera Utara.

¹⁰ Iskandar Putong dan ND Andjaswati, " *Pengantar Ekonomi Makro* ", (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2008) hal. 141.

Tabel 1.2

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 Dalam Bentuk Persen (%)

No	Kabupaten dan Kota			Tahun		
1	Sumatera utara	2019	2020	2021	2022	2023
2	Nias	5.22	-1.07	2.61	4.73	5.01
3	Mandailing Natal	5.04	1.8	2.21	3.06	3.82
4	Tapanuli Selatan	5.3	-0.94	3.2	4.34	4.93
5	Tapanuli Tengah	5.23	0.39	3.24	4.78	5.11
6	Tapanuli Utara	5.18	-0.76	2.56	4.18	4.23
7	Toba	4.62	1.5	3.54	4.25	4.75
8	Labuhan Batu	4.88	-0.27	2.92	4.24	4.93
8	Asahan	5.07	0.09	3.85	4.8	5.03
9	Simalungun	5.64	0.21	3.73	4.66	4.87
10	Dairi	5.2	1.01	3.7	4.68	5.07
11	Karo	4.82	-0.94	2.05	4.21	5.04
12	Deli Serdang	4.6	-0.8	2.25	4.22	5.06
13	Langkat	5.18	-1.78	2.23	4.7	5.34
14	Nias Selatan	5.07	-0,86	3,08	4.69	4.93
15	Nias Barat	5.03	0,61	2,02	3.08	3.65
16	Humbang Hasundutan	4.94	-0,13	2,02	4.21	4.38
17	Pakpak bharat	5,87	-0,18	2,54	4.27	5.1
18	Samosir	5,7	-0,59	2,65	4.48	5.03
19	Serdang bedagai	5,28	-0,44	2,87	4.46	5.03
20	Batu Bara	4,35	-0,31	2,35	4.07	4.08
21	Padang Lawas Utara	5,61	1,14	3,26	4.12	4.92
22	Padang Lawas	5,64	1,18	3,83	4.61	5.14
23	Labuhan Batu Selatan	5,35	0,8	3,82	4.74	4.94
24	Labuhan Batu Utara	5,15	0,27	3,83	4.62	4.76

25	Nias Utara	4,65	1,58	2,02	3.03	3.79
26	Nias Barat	4,82	1,66	2,26	3.01	3.72
27	Sibolga	5,2	-1,36	2,1	4.15	4.2
28	Tanjung Balai	5,79	-0,47	2,35	3.94	4.86
29	Pematang Siantar	4,82	-1,89	1,25	3.47	4.22
30	Tebing Tinggi	5,15	-0,7	2,51	4.01	3.98
31	Medan	5,93	-1,98	2,62	4.71	5.04
32	Binjai	5,51	-1,83	2,23	4.18	4.75
33	Padang Sidempuan	5,51	-0,73	2,75	4.77	5.09
34	Gunung Sitoli	6,05	0,38	2,25	3.11	3.69

Sumber: Bps Sumatera Utara

Menurut data pada tabel 1.2 yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik), Beberapa daerah menunjukkan pertumbuhan positif yang konsisten dari tahun ke tahun, seperti, Tapanuli Selatan, walaupun di tahun 2021 sangat mengalami penurunan drastis sampai di bawah angka 1% lalu Padang Lawas juga mengalami konsisten. Sebaliknya, beberapa daerah mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2020, yang mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, sebelum kembali pulih di tahun-tahun berikutnya. Kemudian ada fluktuasi yang signifikan dalam nilai pertumbuhan di beberapa daerah. Misalnya, Deli Serdang mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2020 (-1.78)% tetapi kemudian pulih pada tahun 2023 (5.34)%. Beberapa daerah, seperti Pematang Siantar dan Tebing Tinggi, menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah atau bahkan negatif pada tahun-tahun tertentu, yang mungkin menunjukkan tantangan ekonomi yang lebih besar.

Selain faktor ekonomi tersebut, pendidikan juga memegang peranan penting dalam perekonomian. Pendidikan adalah usaha sadar keluarga, masyarakat dan

pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan yang berlangsung di dalam dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan agar siswa dapat terus menerus memainkan peran yang berbeda-beda dalam lingkungan kehidupan secara tetap untuk waktu yang akan datang.¹¹

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, ilmu pengetahuan seseorang akan bertambah dan bermanfaat dalam dunia kerja. tahun yang lalu, pendidikan dasar dan menengah adalah wajib. Namun kini pendidikan berkembang hingga pendidikan universitas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.¹²

Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah dapat menggunakan indikator rata-rata lama seseorang bersekolah. Rata-rata lama sekolah dapat di artikan dengan jumlah tahun yang di gunakan seseorang dalam menempuh pendidikan formal.¹³

Menurut teori Mincer yang di kenal dengan Nama persamaan gaji Mincer (Mincerian Wage Equation), perubahan gaji atau pendapatan seseorang selain dipengaruhi oleh keahlian dan pengalaman yang di terima, juga dipengaruhi oleh lamanya durasi bersekolah yang di terima.¹⁴ Hal yang menarik dari model ini yaitu lamanya waktu yang di habiskan seseorang dalam bersekolah menjadi kunci utama pendapatan. Semakin lama seseorang bersekolah berarti semakin tinggi pendidikan

¹¹Amos Neolaka dan Grace Amalia A. Neolaka, '*Landasan Pendidikan : Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*', (Jakarta : Kencana), (2017), h. 11

¹² Juita, D. P., Priya, P., Azwardi, M., & Amra, A. (2024). "Pentingnya Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pendidikan". *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*. Vol. 3, No. 2, (2024), h. 3069.

¹³ www.bps.go.id

¹⁴Mincer, J. "Schooling, Experience, and Earnings." *Human Behavior and Social Institutions*. New York: National Bureau of Economic Research. (1974). h. 32.

seseorang, ini mempengaruhi pendapatan yang di terima dapat semakin meningkat, pendapatan yang meningkat ini bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan, sehingga bisa mengurangi jumlah kemiskinan.¹⁵

Berikut ini tabel yang menunjukkan rata rata lama sekolah di kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Utara periode 2019-2023

Tabel 1.3

Tabel Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara Dalam Tahun 2019-2023 (Dalam Bentuk Persen %)

No	Kabupaten dan Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sumatera utara	9.45	9.64	9.58	9.71	9.82
2	Nias	5.15	5.36	5.64	5.88	6.14
3	Mandailing Natal	8.36	8.62	8.63	8.76	8.84
4	Tapanuli Selatan	8.97	9.28	9.29	9.34	9.51
5	Tapanuli Tengah	8.4	8.62	8.84	8.86	8.87
6	Tapanuli Utara	9.72	9.85	9.99	10	10.19
7	Toba	10.36	10.52	10.57	10.58	10.59
8	Labuhan batu	9.23	9.24	9.25	9.4	9.49
9	Asahan	8.49	8.79	8.8	8.82	8.83
10	Simalungan	9.36	9.6	9.61	9.63	9.72
11	Dairi	9.34	9.58	9.59	9.72	9.88
12	Karo	9.62	9.79	10	10.2	10.3
13	Deli Serdang	10.8	10.9	10.1	10.27	10.28
14	Langkat	8.64	8.65	8.66	8.68	8.73
15	Nias Selatan	5.53	5.85	6.06	6.23	6.48
16	Humbang Hasundutan	9.54	9.53	9.72	10	10.01

¹⁵ Azhar, M, dkk.(2018). "Determinant Return to Education in Indonesia". *Jurnal Manajerial*. Vol. 3. No. 4. Hal 18.

17	Pakpak Bharat	8.73	9.03	9.14	9.39	9.61
18	Samosir	9.15	9.43	9.44	9.46	9.47
19	Serdang Bedagai	8.53	8.54	8.69	8.71	8.85
20	Batu Bara	8.02	8.06	8.07	8.26	8.5
21	Padang Lawas Utara	9.1	9.37	9.38	9.46	9.55
22	Padang Lawas	8.69	9.01	9.02	9.31	9.46
23	Labuhan Batu Selatan	8.74	8.75	8.9	8.92	9.93
24	Labuhan Batu Utara	8.36	8.4	8.41	8.64	8.87
25	Nias Utara	6.25	6.58	6.77	6.78	6.85
26	Nias Barat	6.14	6.49	6.69	6.97	7.07
27	Sibolga	10.18	10.4	10.41	10.43	10.44
28	Tanjung Balai	9.26	9.44	9.45	9.55	9.68
29	Pematang Siantar	11.15	11.16	11.29	11.31	11.58
30	Tebing Tinggi	10.28	10.31	10.44	10.65	10.86
31	Medan	10.38	10.39	10.48	11.5	11.62
32	Binjai	10.77	10.93	10.94	11.18	11.19
33	Padang Sidempuan	10.7	11	11.09	11.11	11.12
34	Gunung Sitoli	8.58	8.61	8.62	8.64	8.65

Sumber: Badan Pusat Statistika Sumatera Utara

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah dari tahun 2019-2023 selalu mengalami kenaikan. Untuk rata-rata seseorang bersekolah paling tinggi terjadi kota Pematang Siantar yaitu di atas angka 11 dan rata-rata lama sekolah paling rendah terjadi kabupaten Nias yaitu di bawah angka 6 di 4 tahun terakhir kemudian naik ke angka 6 di tahun 2023. Rata-rata lama sekolah yang terjadi di provinsi Sumatera Utara yaitu dikisaran angka 9 (setara dengan kelas 3 SMP), hanya beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki angka rata-rata lama sekolah di atas 10. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di Sumatera Utara

masih rendah karena berdasarkan Undang-undang no. 47 tahun 2008 terkait wajib belajar di negara Indonesia yaitu 12 tahun belajar.

Penyebab lain yang juga berdampak pada perekonomian dan tingkat kemiskinan adalah jumlah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah besar dalam masyarakat modern. Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu situasi yang menunjukkan tidak digunakannya sumber daya.¹⁶

Penyebab lain yang juga berdampak pada perekonomian dan tingkat kemiskinan adalah jumlah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah besar dalam masyarakat modern. Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu situasi yang menunjukkan tidak digunakannya sumber daya.¹⁷

Sedangkan Menurut Harlik salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu pengangguran¹⁸. Pengangguran dapat diartikan sebagai seseorang yang termasuk pada angkatan kerja karena sudah mencapai umur kerja serta aktif mencari pekerjaan, akan tetapi belum memperoleh pekerjaan. Menurut Pujoalwanto, pada umumnya pengangguran terjadi karena adanya ketimpangan antara jumlah para pencari kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.¹⁹ Pengangguran akan menyebabkan efek mengurangi pendapatan masyarakat dan ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang sudah di capai, dimana semakin turunnya tingkat kemakmuran, ini akan menyebabkan masalah lain yaitu terkait kemiskinan.²⁰

¹⁶ Hasyim, Ibrahim Ali, "Ekonomi Makro", (Jakarta: Kencana, 2017), h. 198.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Harlik, dkk, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi". *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol. 1. No. 2, (2013), h 12.

¹⁹ Pujoalwanto, B. "Perekonomian Indonesia (Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris)". (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 109.

²⁰ Sukirno, S. (2005.) "Pengantar Ekonomi Makro." Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). Hal 87.

Jika tingkat pengangguran tinggi maka sumber daya akan terbuang sia-sia dan tingkat pendapatan masyarakat akan menurun. Situasi ini menyebabkan stagnasi ekonomi sehingga mempengaruhi emosi masyarakat dan kehidupan sehari-hari keluarga.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan presentase jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019-2023:

Tabel 1.4
Tingkat Persentase Pengangguran Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara
periode Tahun 2019-2023 (Dalam Bentuk Persen %)

no	Kabupaten dan Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sumatera utara	5.41	6.91	6.33	6.16	5.89
2	Nias	1.09	3.49	3.12	2.81	2.31
3	Mandailing Natal	6.37	6.5	6.12	7.64	7.45
4	Tapanuli Selatan	4.17	4.45	4	3.65	3.49
5	Tapanuli Tengah	7.26	7.54	7.24	7.97	7.81
6	Tapanuli Utara	1.33	2.94	1.54	1.07	1.03
7	Toba	1.26	2.5	0.83	1.39	1.3
8	Labuhan batu	5.7	6.05	5.56	6.9	5.99
9	Asahan	6.86	7.24	6.39	6.12	6.12
10	Simalungan	4.39	4.58	4.17	5.51	5.35
11	Dairi	1.58	1.75	1.49	0.88	1.23
12	Karo	1.09	1.85	1.95	2.71	2.63
13	Deli Serdang	5.74	9.5	9.13	8.79	8.62
14	Langkat	5.3	7.02	5.12	6.88	6.33
15	Nias Selatan	2.25	4.15	3.91	3.69	3.48
16	Humbang Hasundutan	0.33	0.84	1.94	0.42	0.84
17	Pakpak Bharat	0.19	1.93	1.36	0.26	0.45

18	Samosir	1.25	1.2	0.7	1.16	1.03
19	Serdang bedagai	4.37	5.54	3.93	4.98	4.97
20	Batu Bara	6.69	6.48	6.62	6.21	5.88
21	Padang Lawas Utara	3.21	3.11	3.19	4.31	4.42
22	Padang Lawas	4.24	4.11	4.07	5.9	5.75
23	Labuhan Batu Selatan	4.8	4.9	4.71	3.15	3.43
24	Labuhan Batu Utara	5.84	5.82	5.71	3.75	4.84
25	Nias Utara	3.07	4.04	3	2.59	2.57
26	Nias Barat	1.63	1.71	0.74	0.53	0.8
27	Sibolga	7.4	8	8.72	7.05	6.79
28	Tanjung Balai	6.82	6.97	6.59	4.62	4.47
29	Pematang Siantar	11.09	11.5	11	9.36	8.62
30	Tebing Tinggi	8.6	9.98	8.37	6.39	6.24
31	Medan	8.53	10.74	10.81	8.89	8.67
32	Binjai	6.14	8.67	7.86	6.36	6.1
33	Padang Sidempuan	4.34	7.45	7.18	7.76	7.57
34	Gunung Sitoli	5.59	5.94	4.8	3.65	3.67

Sumber: Badan Pusat Statistika Sumatera Utara

Menurut data tabel 1.4 di atas ini yang didapat dari BPS (Badan Pusat Statistika) persentase pengangguran di Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara periode tahun 2019-2023 mengalami fluaktuatif dan setiap provinsi lainnya berbeda-beda di Kabupaten Tapanuli Utara dan Toba menunjukkan persentase yang rendah di bawah 2%. Sementara persentase pengangguran paling tinggi terjadi di Kota Pematang Siantar di tahun 2020 yaitu 11.5 %, dan persentase paling rendah terjadi di tahun 2019 di Kabupaten Phakpak Bharat yaitu 0.19%.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian kemiskinan telah banyak dilakukan, akan tetapi yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu pada variabel independen yang digunakan, periode tahun yang digunakan, dan juga lokasi penelitian yang digunakan. Maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 ?
2. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 ?
3. Bagaimana Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Kabupaten dan Kota Sumatera Utara tahun 2019-2023 ?
4. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kabupaten dan Kota Sumatera Utara tahun 2019-2023 ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penelitian, maka permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membatasi masalah pada tahun 2019-2023.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023.

2. Untuk Mengetahui Pengaruh tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, tingkat Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Kabupaten dan Kota Sumatera Utara tahun 2019-2023

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Imam Bonjol Padang.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut dalam aspek yang sama maupun aspek yang berhubungan.

3. Manfaat akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti berikutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah akademik sehingga berguna untuk pengembangan Ilmu.

4. Bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan daerah,

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan dijelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Teori-teori tersebut dikutip dari pertumbuhan ekonomi, konsep kemiskinan, ketimpangan pendapatan antar wilayah. Selain itu, dijelaskan pula mengenai hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang mana dijelaskan adalah tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi variabel penelitian, analisis regresi pengujian, pengujian asumsi klasik, serta pembahasan hasil analisis (pembuktian hasil hipotesis).

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penelitian, terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan didapat dari keseluruhan rangkuman dari keseluruhan pembahasan dari semua hasil analisis kinerja pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran adalah masukkan dari penulis guna kepentingan riset-riset yang akan datang.



UIN IMAM BONJOL
PADANG